

KETAHANAN PANGAN DAN BEBERAPA ASPEKNYA**Adji Sastrosupadi**Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Abstract

Food self-sufficiency mainly for rice has been known since the old order regime by the implementation of five efforts to agricultural technology, seven, ten and suprainus ones. In that condition Indonesia has been succeeded in rice self-sufficiency, therefore Indonesia got appreciation from FAO in 1984. In the reformation era, there was a new paradigm namely food security and in President Joko Widodo's regime known as food-sovereignty. In the first step to realized food security and sovereignty, Indonesia has to be able to food self-sufficiency, especially for rice. In that condition Indonesia has been succeeded in rice self-sufficiency in 1984, therefore Indonesia got appreciation from FAO. The main factors affected these paradigms as mentioned above were technical as agricultural technology and now technically ones as socially, economically and behavioral culture of farmer or community. The first factor easily to be solved because so many technologies have been resulted by the research institute, university and private, but the adoption of technology, which has been resulted in the farmer still not yet optimum. The second ones were more difficult to be solved due to the behavior of the farmer or community. Other than three aspects of food, food safety also necessary to be interested, because healthy food has to be free from bacteria and dangerous chemical substances. The success of all paradigms mentioned before not only need cooperation between agriculture and trade departments, but also other sides concern with all paradigms.

Keywords: Food safety; Food security; food self-sufficiency; food-sovereignty; rice self-sufficiency.

Pendahuluan

Kebutuhan primer bagi manusia dalam falsafat Jawa diungkapkan dalam kata-kata sandang, pangan, papan. Bila seseorang atau suatu keluarga sudah memiliki ketiga kata tersebut terpenuhi maka keluarga sudah aman dalam menjalani suatu kehidupan. Ungkapan ini sebetulnya kurang tepat, karena pangan ditempatkan dalam urutan kedua, yang seharusnya ditempatkan dalam urutan pertama. Tanpa pangan tidak ada kehidupan di dunia ini. Penempatan sandang pada urutan pertama karena menurut falsafah Jawa “*Ajining raga marga busana*”. Harga diri/ martabat seseorang

bahkan suatu bangsa dapat dilihat dari busana/cara berbusana. Dari sejarah budaya manusia dapat terlihat perkembangan berbusana dari manusia purba sampai manusia di zaman modern. Namun di era modern pun, berbusana juga mengalami perubahan, sebagian manusia makin modern makin minim berbusana.

Perlu dibedakan kata pangan dan makanan. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan, sedangkan makanan adalah bahan makanan selain obat, yang mengandung zat gizi dan/ atau unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah

menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan dalam tubuh (Adriani dan Wirjatmadi, 2014). Lebih lanjut dikemukakan zat gizi adalah senyawa kimia yang terkandung dalam makanan yang pada gilirannya diserap dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya dalam menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dan mengatur proses kehidupan bahan makanan. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.

Pada prinsipnya, gizi sangat mempengaruhi kesehatan, kemampuan otak, produktivitas kerja, dan kemampuan belajar. Bila ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun negara, maka harus diiringi dengan usaha atau program untuk memenuhi gizi sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat seperti yang sudah dikenal dengan makanan empat sehat lima sempurna. Untuk mencapai kondisi seperti ini, maka Indonesia harus dapat mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Paradigma atau mazhab swasembada pangan khususnya padi sudah dikenal sejak orde lama dengan penerapan teknologi budidaya padi yang dikenal dengan nama panca usaha pertanian. Pada era selanjutnya, panca usaha pertanian disempurnakan menjadi sapta usaha, dasa usaha dan supra insus. Pada era reformasi, ada paradigma baru yaitu ketahanan pangan. Kemudian para era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada paradigma kedaulatan pangan. Dalam ketahanan pangan ada beberapa aspek yang saling terkait yang meliputi kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan Pangan

Terdapat berbagai definisi tentang ketahanan pangan, antara lain:

1. Ketahanan pangan adalah akses semua orang setiap saat dapat memenuhi pangan yang cukup untuk hidup sehat (Maxwell dan Franken Berger dalam Adriani dan Wirjatmadi, 2014).
2. Ketahanan pangan yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata, dan terjangkau (Undang-undang Pangan No. 7 Tahun 1996).
3. Ketahanan pangan adalah kondisi dimana setiap orang, dari waktu ke waktu mempunyai kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan makanan bergizi dan memiliki preferensi pemilihan makanan yang sehat (FAO, 2013).
4. Ketahanan pangan harus meliputi empat asas, yaitu ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan keamanan pangan (Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012). Definisi ini merupakan penyempurnaan UU Pangan No. 7 Tahun 1996. Dalam UU Pangan No. 7 Tahun 1996 ini banyak kelemahannya antara lain tidak mempersoalkan pangan itu diimpor atau tidak.

Menurut UU Pangan No. 18 Tahun 2012 sudah menyangkut adanya kemandirian pangan artinya Indonesia harus dapat berswasembada pangan. Wawasan ini mempunyai pengertian dalam waktu mendatang Indonesia tidak perlu impor pangan, kecuali ada kondisi

yang memaksa seperti adanya anomali iklim baik El Nino maupun La Nina dan gangguan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan identik dengan swasembada pangan yang berarti Indonesia harus dapat mencukupi kebutuhan pangan yang dihasilkan dari dalam negeri dan tidak tergantung dari impor. Masih banyak yang mengartikan pangan di sini sama dengan beras, meskipun menurut definisi pangan tidak hanya beras, tetapi masih banyak pangan yang diperoleh dari tanaman selain padi. Untuk beras ternyata Indonesia mampu swasembada pada tahun 1984 dan beberapa tahun berikutnya (Sumaryanto, 2004; Hafisah dan Sudaryanto, 2004; Noerjahyo, 2015). Atas keberhasilan swasembada beras ini akhirnya Indonesia mendapat penghargaan dari FAO karena "*From Rice Imports to Self Sufficiency*" pada 21 Juli 1986 yang diterima oleh Presiden Soeharto (Soesilo, 2013). Keberhasilan tersebut juga sebagai karya besar pemerintah dalam investasi irigasi, penelitian dan penyuluhan, penerapan kebijakan harga saran produksi dan produk pertanian, dan bantuan kredit. Swasembada beras tidak dapat berlanjut dan impor beras Indonesia cenderung terus meningkat, dari hanya 1,5 juta ton pada tahun 1995 menjadi 2,5 juta ton pada tahun 2002. Impor beras tertinggi mencapai 4,3 juta ton pada tahun 1999 sebagai akibat dari El Nino. Pada tahun 2014 dan 2018 Indonesia mengimpor beras masing-masing sebesar 405 ribu dan 500 ribu ton dari beberapa negara Asia (Kompas, 2018). Masalah perberasan ini yang menyangkut impor beras sering menjadi polemik dalam pemilihan presiden.

Dalam rangka swasembada pangan, khususnya beras, pemerintah

Indonesia sejak tahun 1948 hingga saat ini telah banyak membuat program peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Program peningkatan produktivitas padi dikenal dengan nama 'Panca Usaha Pertanian' yang meliputi: a) penggunaan bibit unggul, b) pemberantasan hama dan penyakit, c) pengairan yang teratur, d) pemupukan, dan e) pengolahan tanah yang baik (Nasoetion, 2000; Hafisah dan Sudaryanto, 2004; Tim Penyusun Agribisnis Padi, 2007). Selanjutnya Panca Usaha Pertanian dilanjutkan menjadi Sapta Usaha Tani dan Dasa Usaha Tani. Sapta Usaha Tani meliputi Panca Usaha Tani ditambah komponen penyuluhan dan penanganan pasca panen serta pemasaran. Dasa Usaha Tani meliputi: a) pengolahan tanah yang sempurna, b) benih bermutu tinggi (bersertifikat), c) populasi tanaman \geq 200.000 per ha, d) perbaikan tata guna air di tingkat usaha tani, e) pemupukan berimbang (NPKS) dengan takaran yang sesuai dengan anjuran setempat, f) penggunaan pupuk pelengkap cair/ zat pengatur tumbuh, g) pengendalian hama penyakit secara terpadu, h) penanganan panen dan pasca panen sesuai rekomendasi, i) pergiliran varietas/ jenis padi antar musim tanam dan antar kelompok tani, dan j) pengaturan pola tanam IP > 200% dan pemeliharaan tanaman secara baik (Departemen Pertanian, 1987; Fagi dkk. 2009). Dalam perkembangan selanjutnya penggunaan PPC (Pupuk Pelengkap Cair) dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) ditiadakan karena hasilnya tidak konsisten. Teknologi budidaya padi masih terus disempurnakan dengan disertai berbagai rekayasa atau kebijakan non teknis atau dikenal dengan rekayasa sosial ekonomi.

Kemandirian pangan berpeluang untuk dicapai dalam arti pangan tidak beras (padi) melulu, melainkan berupa

sumber karbohidrat yang lain seperti: jagung, ubi-ubian, dan sagu atau tanaman yang lain. Dengan kata lain harus melaksanakan diversifikasi pangan atau keaneka ragaman pangan dijalankan seperti masa-masa yang lalu sebelum tahun lima puluhan. Salah satu kelemahan yang terjadi sekarang ini dari semula keaneka ragaman pangan menjadi “berasasis” dan ini sangat beresiko sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian dan kelambanan pembukaan lahan pertanian baru atau ekstensifikasi.

Kedaulatan Pangan

Terdapat beberapa definisi tentang kedaulatan pangan. Menurut Priyono, Sekjen Kementerian Pertanian (Agrina, 2015) kedaulatan pangan mempunyai beberapa arti pemenuhan kebutuhan pangan harus dilakukan pemerintah dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain atau pihak asing. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidak bisa bertumpu pada sektor pertanian saja, tetapi masih ada sektor perdagangan, industri dan lainnya, sehingga perlu sinergi antar sektor. Dengan demikian program dalam kedaulatan pangan harus sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar bahwa sumber daya alam harus dikuasai dan dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Ditinjau dari aspek swasembada dan ketahanan pangan saja, maka untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak sedikit tantangannya, baik tantangan teknis dan non teknis. Tantangan non teknis lebih berat dibandingkan tantangan teknis karena melibatkan sosial ekonomi masyarakat, terutama untuk petani. Menurut Dillon (Kompas, 2014) dalam kedaulatan pangan, pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan

segala alat atau kebijakan yang dimiliki bangsa dalam kondisi apapun. Ujung dari kedaulatan pangan adalah keberpihakan kepada petani (rakyat). Dalam konteks kedaulatan pangan ini, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa kedaulatan pangan tidak sama dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan berorientasi pada ketersediaan pangan, tanpa peduli asal-muasalnya, misalnya impor, dan tanpa peduli nasib petani. Sehubungan dengan pengertian tentang kemandirian (swasembada) pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan, maka urutan pencapaiannya yaitu harus terwujud terlebih dahulu kemandirian pangan. Setelah itu baru dapat terwujud ketahanan pangan dan akhirnya kedaulatan pangan tercapai.

Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan). Sedangkan yang dimaksud makanan aman adalah makanan yang bebas dari cemaran fisik, kimiawi maupun mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Kesimpulan

Mewujudkan ketahanan pangan merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena banyak sekali faktor yang terlibat, baik faktor teknis (budidaya tanaman) maupun non teknis (sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat/ petani). Faktor teknis relatif mudah diatasi, sedangkan faktor non teknis lebih sulit karena

melibatkan sosial, ekonomi, dan perilaku petani/masyarakat. Sudah banyak hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh Bala Penelitian, Perguruan Tinggi dan Swasta, namun tingkat adopsinya masih rendah. Ketahanan, kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan dapat diwujudkan bila ada sinergi dari berbagai pihak, khususnya antara kementerian dan kementerian perdagangan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pangan.

Daftar Pustaka

- Adrian, M. dan B. Wirjatmadi. 2014. Pengantar Gizi Masyarakat. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dillon, H. S. 15 Oktober 2014. Kedaulatan Pangan Harus Jadi Perhatian. Kompas, Hlm 19.
- Fagi, A.M., C. P Mamaril dan M. Syam. 2009. Revolusi Hijau, Peranan dan Dinamika Lembaga Riset. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi.
- FAO. 2013. The State of Food Insecurity in The World. Fao, Rome.
- Hafsah M.J. dan T. Sudaryanto.2004. Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Kelana, A. dan U. Khusniah. 2015. Sengkarut Penanganan Makanan Berbahaya. Gatra, hlm.13-17.
- Kompas, 16 Januari 2018. Penugasan Impor Beras Dialihkan ke Perum Bulog, hlm. 17
- Nasoeton, A. H. 2000. Pengantar ke Ilmu-ilmu Pertanian.PT Pusaka Litera Antar Nusa. Jakarta.
- Noertjahyo, J. A. 2005. Dari Ladang sampai Kabinet Menggugat Nasib Petani. Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soesilo, I. 2013. Menuju Dunia 2030. Majalah Sains Indonesia Edisi 19 Juli 2013.
- Sumaryanto. 2004. Usaha Tani dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi: Studi Kasus di Persawahan DAS Brantas. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan.
- Tim Penyusun Agribisnis Padi. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Padi. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.

